



Fungsi Pemberdayaan oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Agusen Kecamatan Blangkejeren

Wan Safina Tunnaja¹, Adil Mubarak²

^{1,2}Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat, Indonesia

E-mail: wansafinatunnaja12@gmail.com adilmubarak@fis.unp.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2022-08-11 Revised: 2022-09-22 Published: 2022-12-02 Keywords: <i>Government Functions; Economic Empowerment; Community</i>	Community empowerment is an effort to improve the welfare of the community through the support and functions of the government to improve the economy. This study aims to determine the function of the government of Gayo Lues Regency in improving the economy of the Agusen Village community, Blangkejeren District and to find out the government's obstacles in carrying out its functions. There are three functions of the government, namely as a regulator, dynamist, and facilitator, then the government's obstacles in carrying out its functions are divided into two, namely internal and external. The method used in this study is a qualitative descriptive method with data collection in the form of interviews, observations, and documentation studies as well as through the research stages, namely the data reduction stage, data presentation and conclusion drawing with data triangulation techniques. The results of this study indicate that community empowerment in the form of policies, coaching/training and mentoring, as well as facilities from the government are still inadequate and not evenly distributed. Then for the government's constraints, namely the limited budget/funds, the quality of human resources is still low, and the lack of experts. Constraints from the community are the lack of entrepreneurial interest, the slow development of technology, and the low level of education and knowledge. For this reason, the government should pay more attention to the community by providing socialization in the form of coaching and training to increase knowledge and enthusiasm and encourage entrepreneurial interest in order to increase people's income.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2022-08-11 Direvisi: 2022-09-22 Dipublikasi: 2022-12-02 Kata kunci: <i>Fungsi pemerintah; Pemberdayaan Ekonomi; Masyarakat.</i>	Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya dalam mensejahterakan masyarakat melalui dukungan dan fungsi pemerintah untuk meningkatkan perekonomian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Agusen Kecamatan Blangkejeren dan untuk mengetahui kendala pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Ada tiga fungsi pemerintah yaitu sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator, lalu kendala pemerintah dalam menjalankan fungsinya terbagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi serta melalui tahapan penelitian yaitu dengan tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat berupa kebijakan, pembinaan/pelatihan dan pendampingan, serta fasilitas dari pemerintah masih masih belum memadai dan belum merata. Kemudian untuk kendala pemerintah yaitu terbatasnya anggaran/dana, kualitas SDM yang masih rendah, serta kurangnya tenaga ahli. Kendala dari masyarakat adalah kurangnya minat wirausaha, lambatnya perkembangan teknologi, serta rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan. Untuk itu seharusnya pemerintah agar lebih memperhatikan masyarakat dengan memberikan sosialisasi baik berupa pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan semangat serta mendorong minat wirausaha guna untuk menambah pendapatan masyarakat.

I. PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan tujuan kesejahteraan. Dalam Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 40 Tahun 2020 yang

berkaitan dengan perkembangan pembangunan daerah dijadikan pertimbangan dalam fase peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga diarahkan untuk terwujudnya percepatan kesejahteraan masyarakat luas diantaranya melalui pendekatan pelayanan, peningkatan pembangu-

nan, peningkatan potensial ekonomi masyarakat, dan peningkatan potensi ekonomi lokal. Peraturan ini menunjukkan bahwasanya tujuan pemerintah adalah untuk terwujudnya potensi ekonomi dengan pemberdayaan masyarakat guna untuk percepatan kesejahteraan masyarakat desa. Pemberdayaan sangatlah penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa khususnya, karena dengan pencapaian pemberdayaan masyarakat desa maka juga akan berpengaruh untuk peningkatan ekonomi daerah, oleh karena itu perlu dilakukannya pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah untuk meningkatkan ekonomi dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah.

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satunya adalah salah satu amanat pembentukan Kabupaten untuk memberdayakan masyarakat desa, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 221 ayat 1 bahwa, "Daerah" Kabupaten/Kota membentuk kec. dalam rangka meningkatkan koordinasi pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi, setiap daerah memiliki tantangan dalam perkembangan serta pemberdayaan masyarakatnya, dengan begitu perlu adanya fungsi pemerintah untuk menjalankan tugas dengan mengupayakan pemberdayaan ekonomi di lingkungan masyarakat desa. Jadi pada poin di atas yaitu terkait mengkoordinasikan kegiatan terkait pemberdayaan masyarakat yang mana disini dinas yang bersangkutan adalah DPMK (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung) Kabupaten Gayo Lues yang bekerjasama dengan dinas-dinas yang berkaitan, pemerintah kecamatan, serta pemerintahan desa. Desa Agusen di-ketahui terkenal dari sisi negatifnya saja, karena desa ini adalah produksi ganja yang luas dan sudah banyak didapati dan dimusnahkan oleh pihak yang berwajib. Selain itu Desa Agusen juga merupakan desa yang terpencil dan jauh dari pusat keramaian/kota sehingga sulitnya akses jalan menuju Desa Agusen karena banyaknya jalan yang rusak dan curam. Dengan akses yang sulit untuk dijangkau juga berdampak pada pendidikan masyarakatnya, karena tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah dan jarak yang jauh dari lembaga pendidikan yang harus dilalui anak-anak agar bisa masuk sekolah, ini berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia.

Masyarakat Agusen masih kurang dalam ilmu pengetahuan, keterampilan, dan teknologi sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Agusen masih rendah, karena

pendapatan masyarakat hanya terfokus pada sektor pertanian saja (Sukri: 2020). Desa Agusen terdapat rendahnya pendidikan masyarakat mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Penyebab rendahnya pendidikan disebabkan oleh faktor ekonomi serta jarak yang jauh juga untuk bisa mencapai lembaga pendidikan sehingga anak-anak di Desa Agusen harus ditempuh dengan berjalan kaki untuk bisa sampai ke sekolah, ini mengakibatkan anak-anak banyak yang putus dalam masa pendidikan (Sakdiah: 2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Fungsi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Agusen Kecamatan Blangkejeren serta bertujuan untuk mengetahui kendala pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Menurut Kartasmita dalam (Alfitri: 2011) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses pelepasan dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan serta perbaikan dengan pembangunan di lingkungan masyarakat. Beberapa tahapan dalam proses pemberdayaan menurut Azis (dalam Alfitri, 2011:26) yaitu dengan mengarahkan masyarakat dalam menemukan agar dapat memecahkan masalah dengan mencari solusi berupa pendekatan sosial dan budaya yang ada di masyarakat itu sendiri berupa tindakan pemberdayaan.

Menurut Arsyiah: 2009 dalam (Haqqie 2016) Berikut ini adalah fungsi/peran pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat;

1. Pemerintah sebagai Regulator yaitu pemerintah yang bisa menciptakan regulasi untuk pemberdayaan dan mampu menerapkan kebijakan-kebijakan yang ada. Untuk itu regulasi yang telah ditetapkan harus dapat memberikan perubahan dalam pemberdayaan masyarakat.
2. Pemerintah sebagai Dinamisator yaitu pemerintah yang bertugas untuk memberikan pembinaan, pelatihan serta pendampingan yang dapat menambah pengetahuan serta pengembangan kualitas SDM.
3. Pemerintah sebagai Fasilitator yaitu pemerintah yang memberikan fasilitas (mewakili kepentingan untuk proses meningkatkan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan kenyamanan dan aman dengan menyediakan sarana dan prasarana pembangunan. Fasilitas bagi UKM, misalnya, pemerintah memberikan fasilitas untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh UKM.

Secara umum kendala atau hambatan dibagi menjadi dua, yaitu kendala internal (dari dalam)

dan eksternal (dari luar). Menurut Ibrahim (1988:122) dalam Haqqie (2016) ada enam faktor penghambat utama dalam inovasi pemberdayaan, yaitu;

1. Perencanaannya masih kurang
2. Konflik
3. kurangnya motivasi kerja
4. belum berkembangnya inovasi masyarakat
5. masalah dana
6. hubungan sosial masih kurang

Menurut Arsiyah (2009:374) dalam (Haqqie: 2016) mengatakan bahwa ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Pertama, Hambatan internal adalah hambatan yang mempengaruhi pemerintahan. Kedua, hambatan eksternal merupakan pengaruh yang berasal dari masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, serta studi dokumentasi. Tahapan penelitian ini melalui tiga tahap yaitu: tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Setelah dilakukannya tahapan penelitian maka data diuji dengan teknik triangulasi data untuk menguji keabsahan data. Menurut Sugiyono: 2007 Triangulasi merupakan suatu proses untuk memastikan keabsahan data. Triangulasi dalam penelitian ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dan dengan berbagai cara. Dengan demikian ada tiga cara triangulasi data yaitu: triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Penelitian ini dilakukan di Desa Agusen Kecamatan Blangkejeren Tepatnya Di Kabupaten Gayo Lues, yang terletak di Provinsi Aceh. Informan penelitian ini terdiri dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Gayo Lues, *Pengulu/Geuchik* Atau Kepala Desa Agusen, serta masyarakat selaku pelaku wirausaha dan petani.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi di desa Agusen masih kurang dan belum maksimal. Melihat dari fungsi pemerintah sebagai regulator, bahwa peraturan atau kebijakan atau program belum sepenuhnya

diterapkan dan dipahami. Fungsi pemerintah sebagai dinamisor juga masih belum merata karena untuk tim pembinaan, pelatihan, dan pendampingan dari tenaga ahli masih kekurangan sedangkan banyak desa dan masyarakat yang membutuhkan hal tersebut. Selanjutnya fungsi pemerintah sebagai fasilitator, yang mana pemerintah memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk kebutuhan pertanian seperti; pupuk-pupukan, bibit kopi, dan mesin yang dapat digunakan untuk pertanian dinilai masih kurang, lalu dari segi kewirausahaan khusus untuk masyarakat desa Agusen sudah memiliki peluang untuk masyarakat karena sudah dijadikan tempat untuk berwisata. Program-program untuk sekarang belum ada karena terbengkalai dengan kejadian covid-19 tahun lalu yang menyebabkan krisis ekonomi pada setiap daerah sehingga masih meninggalkan dampak negatif bagi perekonomian masyarakat desa. Namun untuk sekarang program-program sebelumnya masih berjalan khususnya untuk desa Agusen yang saat ini dalam perjalanan desa wisata sehingga dengan kebijakan ini diharapkan dapat menambah pendapatan masyarakat agar dapat mendirikan usaha di lingkungan wisata khususnya. Untuk proses sosialisasi di desa dilakukan tidak menentu dan dilakukan saat dibutuhkan tergantung kebijakan dari pemerintahan desa.

Berbicara terkait fasilitas untuk desa di kabupaten Gayo Lues sudah memiliki dana desa di setiap daerahnya yang mana dana ini dikelola oleh pemerintah desa yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitian di lokasi bahwasanya fasilitas masih kurang dari segi pertanian yang mana alat-alat seperti mesin digunakan secara bergantian oleh masyarakat sehingga banyak antrian yang menunggu untuk memakai alat pertanian tersebut. Untuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi tentu saja memiliki kendala atau hambatan pemerintah dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Ada terdapat dua kendala pemerintah dalam menjalankan fungsinya di desa Agusen, pertama, kendala internal yang terdapat dalam pemerintahan itu sendiri dan, kedua, kendala eksternal yang terdapat pada masyarakatnya. Dapat dilihat sebagai berikut:

1. Kendala internal yang berada di lingkup pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yakni masih kurangnya anggaran/dana untuk pemberdayaan ma-

syarakat apalagi setelah covid-19 selesai. Kedua, dalam bidang kualitas SDM yang masih kurang dalam bidang pendidikan dan masih lambat untuk menyesuaikan dengan teknologi yang berkembang sehingga sulit untuk memberikan pemahaman kepada mereka. Untuk pemerintahan sendiri juga menjadapatkan kendala dari segi anggota yang kurang untuk memberikan sosialisasi sedangkan masyarakat tersebar di banyak desa di seluruh Kabupaten Gayo Lues.

2. Kendala eksternal yang terdapat pada masyarakat yang dirasakan dalam pemberdayaan masyarakat adalah berbagai fasilitas/infrastruktur dan kualitas SDM yang tersedia masih kurang. Permasalahan tersebut berpengaruh terhadap pengelolaan dan perkembangan pertanian dan wirausaha serta pariwisata dalam meningkatkan ekonomi masyarakatnya. Dari permasalahan tersebut, sehingga muncul berbagai kebutuhan untuk mengatasinya. Seperti bekerjasama dengan masyarakat setempat maupun pihak luar untuk meningkatkan infrastruktur dan SDM agar senantiasa memberikan inovasi terhadap pengelolaan pariwisata serta kebutuhan permodalan untuk mengembangkan infrastruktur dan SDM.

Selain itu terdapat pada masyarakat yang kurang bersemangat untuk berwirausaha padahal peluang untuk menambah penghasilan ada dengan berdagang di area wisata dan menjual produk hasil pertanian. Terdapat bahwasanya banyak masyarakat luar yang berwirausaha daripada masyarakat desa agusen itu sendiri. Sosialisasi dan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah terkadang diabaikan begitu saja sehingga masih adanya masyarakat yang tidak peduli dengan peraturan dan sanksi yang diberikan dengan menanam ganja, hingga saat ini masih ditemukan ganja oleh pihak kepolisian karena kesadaran masyarakat yang masih kurang dan tidak peduli lingkungan. Kendala dari masyarakat sendiri terdapat gagalnya hasil pertanian yang mana diakibatkan cuaca dan hewan-hewan yang merusak lahan pertanian mereka sehingga ada yang menyerah untuk melanjutkan pertanian karena mendapat kerugian yang besar. Lalu untuk harga pasar hasil pertanian juga tidak stabil karena naik turun sedangkan harga pupuk masih tetap.

B. Pembahasan

Secara teoritis fungsi pemerintah sebagai regulator itu bukan saja memproduksi aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan saja tapi fungsi sebagai regulator itu bagaimana aturan-aturan atau program-program tersebut dapat diimplementasikan dengan benar. Sementara di lapangan regulasinya ada tapi tidak berjalan seperti program lembaga adat, masyarakat hukum adat dan lainnya yang dibuat regulasinya namun tidak dijalankan dengan begitu tidak akan tercapainya pemberdayaan masyarakat jikalau tidak berjalannya program-program dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Adanya program yang terlaksana yaitu program Peraturan Bupati terkait BUMK (Badan Usaha Milik Kampung) dengan penetapan Desa Agusen menjadi objek wisata dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Menurut Mubarak: 2022 semua badan usaha dapat dipastikan memiliki tujuan yang sama dengan mendapatkan serta menambah keuntungan yang sebesar-besarnya dari kegiatan dan pengembangan usaha yang mempunyai *value* atau nilai atau hasil yang dapat mengembangkan potensi atau aset yang ada dengan tujuan untuk kesejahteraan bersama di lingkungan masyarakat.

Peneliti menemukan bahwasanya di lapangan masih belum optimal dari fungsi pemerintah dalam pemberdayaan sebagai pembuat kebijakan, pembinaan, serta fasilitas. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan fungsi mereka sebagai regulator, dinamisator, serta fasilitator yang berperan penting untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta untuk mendukung pembangunan desa. Namun peneliti menemukan alasan mengapa fungsi pemerintah tidak berjalan, ini dikarenakan keadaan new normal yang mana baru saja terbebas dari covid-19 yang menyebabkan krisis ekonomi pada hampir seluruh daerah sehingga DPMK kekurangan anggaran/dana dalam melakukan tugasnya. Untuk itu perlu untuk memperhatikan dan mencari jalan keluar untuk permasalahan tersebut seperti yang peneliti temukan bahwasanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sedang berusaha untuk mendapatkan anggaran dengan cara mengajukan proposal kepada pemerintah daerah agar bisa berupaya untuk memanfaatkan perannya dalam pemberdayaan masyarakat.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu pemerintah sudah mengupayakan pemberdayaan masyarakat dengan menciptakan kebijakan-kebijakan serta memberikan pembinaan, pelatihan, dan pendampingan untuk masyarakat serta memberikan fasilitas berupa bantuan untuk pertanian dan wirausaha. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung bekerjasama dengan dinas-dinas yang terkait, namun masih terkendala dari terbatasnya anggaran/dana, tenaga yang masih kurang dalam melakukan penyuluhan sehingga adanya desa dan masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau oleh pemerintah, ini berdampak pada masyarakat yang belum merasa berdaya dan sejahtera dari segi ekonomi. Namun masyarakat juga merupakan salah satu faktor kendala eksternal pemerintahan dikarenakan masyarakat desa Agusen sebagian masih kurang bersemangat untuk mendirikan wirausaha sedangkan desa Agusen mempunyai peluang untuk bangkit dengan ditetapkannya desa agusen sebagai tempat untuk berwisata. Selain itu juga masyarakat masih dalam lingkungan tradisional sehingga masih lambat untuk mengikuti perkembangan teknologi sehingga kualitas SDM yang masih kurang dalam pendidikan dan pengetahuan juga menjadi hambatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

B. Saran

Untuk DPMK dan pemerintah yang terkait agar lebih memperhatikan masyarakat dengan memberikan masyarakat berupa regulasi yang dapat mendukung pemberdayaan dan meningkatkan sosialisasi baik berupa pelatihan, pembinaan, dan pendampingan serta fasilitas agar memadai. Ini bertujuan agar kualitas Sumber Daya Manusia bisa meningkat baik berupa pengetahuan, cara mengelola usaha, dan pengembangan teknologi, karena memang pemerintah bertugas untuk mendukung dan mendorong kesejahteraan masyarakatnya. Dengan sejahteranya masyarakat di desa maka juga berdampak pada daerah dengan meningkatnya perekonomian desa maka perekonomian daerah juga meningkat. Pemberdayaan masyarakat memang tidak mudah karena menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, namun sebagai pelayan publik maka pemerintah harus menghadapi dan harus

menggunakan kekuatan ekstra demi tercapainya kesejahteraan. Adapun regulasi yang ditujukan untuk Desa Agusen yaitu dengan menjadikan desa tersebut menjadi objek wisata sehingga dengan adanya kebijakan ini dapat menambah pendapatan masyarakat karena bisa menambah lapangan pekerjaan. Untuk masyarakat memang suatu perihal yang penting untuk mendukung suatu daerah untuk berhasil dalam bidang pemberdayaan. Namun masyarakat juga harus lebih bersemangat dan memiliki minat untuk tahap-tahap pemberdayaan karena pemerintah hanya memberikan arahan dan dukungan serta fasilitas dan masyarakatlah yang mengelola apa yang diberikan pemerintah. Agar masyarakat berminat untuk mengembangkan UMKM dan memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfitri, A. (2011). *Community Development, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (25-26).
- Arsiyah, A. (2009). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa*, WACANA Vol. 12 No. 2.
- Mubarak, A., Syamsir & Frinaldi, A. *Penguatan Badan Usaha Milik Nagari Melalui Pelatihan Penyusunan Business Model Canvas*. *HINAMISIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 6, No. 5.
- Musa. (2017). *Optimalisasi Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Tawaran dalam Mengentaskan Kemiskinan*. *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*. Vol. 8, no. 1.
- Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung Dan Prioritas Penggunaan Dana Kampung Tahun Anggaran 2021.
- Sakdiah, Zulfadli, dan Sulaimasyah. (2019). *Peran Objek Wisata Agusen Dalam Menambah Pendapatan Masyarakat (Studi di Gampong Agusen Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)*. *Jurnal Al-Ijtima'iyyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam*. Vol. 5, No. 1,

- Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sukri, (2020). Upaya Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Berbasis Desa Wisata Guna Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Agusen Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues-Aceh. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Vol, 13, no, 1.
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 9) Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.